



Judul : Revisi undang-undang ITE: bahas 38 DIM, DPR segera bentuk panja
Tanggal : Selasa, 11 April 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Revisi Undang-Undang ITE Bahas 38 DIM, DPR Segera Bentuk Panja

DPR dan Pemerintah sepakat membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pembahasan atas perubahan Undang-Undang ITE ini akan dilanjutkan pada Mei mendatang.

"Setelah kita mendengarkan pandangan fraksi-fraksi, maka dapat kita simpulkan bahwa fraksi-fraksi di Komisi I DPR menyetujui untuk membahas RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE bersama-sama dengan Pemerintah," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almayshari di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Kharis menuturkan, pembahasan selanjutnya dilakukan pada masa persidangan kelima masa sidang tahun 2022-2023 mengingat masa persidangan keempat ini berakhir pada Kamis (13/4), pekan ini. Adapun jadwal pembahasan akan disesuaikan dengan jadwal rapat di Komisi I DPR yang akan dimulai 16 Mei 2023.

Kharis menuturkan, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU ITE sebanyak 38 yang terdiri atas DIM usulan yang bersifat tetap sebanyak tujuh DIM, kemudian tujuh DIM usulan perubahan redaksional, dan 24 DIM usulan perubahan substansi. "Berikutnya terdapat 16 DIM RUU usulan baru dari fraksi serta DIM penjelasan sebanyak 26 DIM," ujarnya.

Untuk pembahasan DIM ini, sambung Kharis, akan dibentuk Panja dengan pimpinan Panja 5 orang. Adapun anggota panja per fraksi, yakni PDIP berjumlah 6 anggota, kemudian Golkar, Gerindra, Nasdem dan PKB masing-masing 3 orang. Lalu Demokrat, PKS, dan PAN masing-masing 2 orang. Dan terakhir PPP 1 orang. Total tim Panja DPR berjumlah 25 anggota.

"Berikutnya terkait pemba-

hasan RUU perubahan kedua atas Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE dilakukan pada masa persidangan kelima tahun sidang 2022-2023," tambah dia.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Farah Puteri Nahlia menuturkan, UU ITE 2008 sebelumnya telah mengalami perubahan pada 2016. Selanjutnya, UU ITE kembali mengalami revisi tahun ini dengan mengikuti dinamika dan perubahan masyarakat. Khususnya dalam memenuhi kebutuhan perlindungan hukum bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dengan lebih baik.

"Pemberian jaminan atas hak kebebasan berpendapat harus diseimbangkan dengan penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan. Tidak boleh tercederai oleh tindakan-tindakan yang mengusik nilai-nilai kemanusiaan melalui tindakan penghinaan dan atau pencemaran nama baik," tuturnya.

Farah berpandangan perlu dilakukan perubahan atas UU ITE lantaran terdapat pasal-pasal dan penjelasan pasal yang dirasa belum menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. "Berdasarkan pandangan tersebut, Fraksi PAN menyatakan siap membahas RUU ITE sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelasnya.

Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G Plate menegaskan, Pemerintah siap menindaklanjuti pembahasan revisi Undang-Undang ITE ini. Pemerintah juga telah membentuk Panja RUU ITE dengan ketua Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan, Wakil Ketua Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Nana Mulyana. Juga dilengkapi oleh sejumlah anggota dari wakil Pemerintah lainnya termasuk di dalamnya dari Direktorat Ciber Polri. ■ KAL